



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan dalam organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap- tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang, selain itu Renstra merupakan bagian integral dari Visi, Misi, Program, Kegiatan dan Penyusunan Anggaran. Dengan demikian Renstra merupakan suatu tuntunan atau acuan dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan suatu Daerah/Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 lima tahunan (2014-2018), dan selanjutnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) serta memperhatikan RPJM Nasional dan berkorelasi serta konsistensi dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana strategis SKPD yang menindaklanjuti program RPJMD kedalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun.

Program dan kegiatan dalam renstra SKPD harus koheren dengan sasaran RPJMD, dengan demikian RPJMD SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang merupakan salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam urusan operasional sesuai tupoksinya. Penyelenggaraan urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan secara eksplisit tercantum dalam RPJP 2005-2025 Kabupaten Sidenreng Rappang, secara implisit kedudukan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai penyelenggara program Pemerintah Kabupaten, baik sebagai pendukung maupun sebagai penunjang. Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan perlu dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis terlaksana dengan baik

Renstra Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sidenreng Rappang*

Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2014-2018 merupakan Renstra Tahap ke-3 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025. Disamping itu Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas SKPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2014-2018.

b. *Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang*

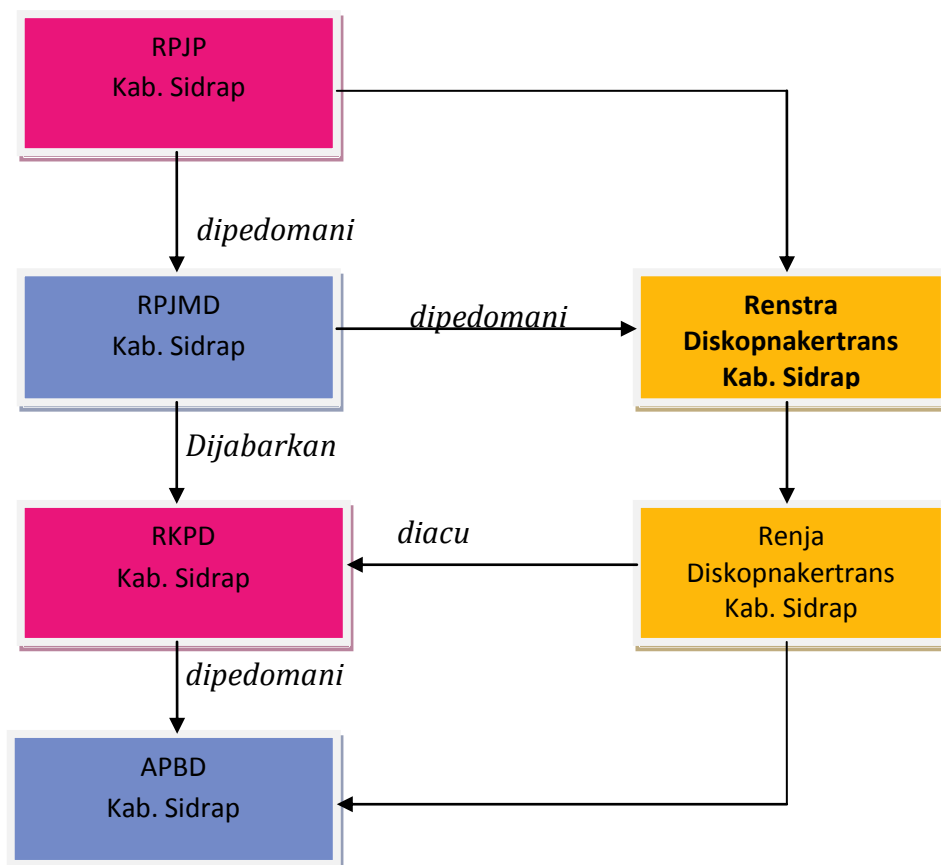
Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018.

c. Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang

Pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2014-2018 harus dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya.

d. Renstra dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Renstra pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2014-2018, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Oleh karena itu penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2014-2018 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.



Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 -2025;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen dan *stakeholders* lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi, selain itu Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

Pertama, Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai Visi Misi Bupati Sidenreng Rappang yaitu **“TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT”** sebagai akselerasi pencapaian Visi Misi Sidenreng Rappang 2005-2025.

Kedua, Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2014-2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2014-2018 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 93 Sistematika Penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- 2.2. Sumberdaya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

BAB III ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- 3.4. Telaahan RTRW dan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

- 5.1. Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja
- 5.3. Kelompok Sasaran
- 5.4. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 6.1. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII P E N U T U P

- 7.1. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

Pelayanan Umum khususnya pada Bidang Koperasi melayani masyarakat dalam mendirikan koperasi baru, memfasilitasi pinjaman bantuan melalui Perbankan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi yang tidak sehat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan Bidang yang bersentuhan langsung terhadap pelaku ekonomi tingkat bawah (Ekonomi Kerakyatan) yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu UMKM ini difasilitasi melalui Perbankan untuk mendapatkan pinjaman atau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada Bidang Tenaga Kerja melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal meningkatkan kualitas tenaga kerja, Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pada Bidang Transmigrasi dilakukan pengembangan wilayah transmigrasi sebagai bentuk perluasan kesempatan berusaha menuju masyarakat adil dan makmur.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. *Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi*, mempunyai tugas memimpin Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas, menjalin dan mengkoordinasikan Sekretariat Dinas dan Bidang-Bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta Tugas lain yang diserahkan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Dinas, Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi serta membuat laporan secara berkala.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi*, mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesekretariatan Dinas;
 - b. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Koperasi;
 - c. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang UMKM;
 - d. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Tenaga Kerja;
 - e. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Transmigrasi;
 - f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokoknya.

Sekretaris

1. *Sekretaris*, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sekretariat, menghimpun dan mengkompilasi Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja dari setiap bidang dalam lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas dan para Kepala

Bidang lingkup Dinas, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penatausahaan dan ketatalaksanaan urusan dan perencanaan umum dinas, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat dan membuat laporan secara berkala.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Sekretaris* mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan Penatausahaan Urusan Perencanaan Umum;
 - b. Penyelenggaraan dan Penatausahaan Urusan Keuangan;
 - c. Penyelenggaraan dan Penatausahaan Urusan Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Perencanaan; mengkoordinasikan dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas pekerjaan dilingkup sub bagian; melaksanakan pengkajian; pengumpulan dan penyiapan bahan untuk petunjuk teknis perencanaan dinas, melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan bidang perencanaan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada sub bagian perencanaan, serta membuat laporan secara berkala.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran sub bagian keuangan, membantu strategis dalam menghimpun rancangan rencana strategis dan rencana kerja anggaran (RKA) serta dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing bidang dalam lingkup Dinas

Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; mengkoordinasikan dengan sekretaris dan kepala sub bagian perencanaan serta kepala sub bagian umum dan kepegawaian, menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup sub bagian keuangan, melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Dinas, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di sub bagian serta membuat laporan secara berkala.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas yaitu menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran sub bagian umum dan kepegawaian, membantu sekretaris dalam menghimpun rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, mengkoordinasikan dengan sekretaris, kepala sub bagian perencanaan dan kepala sub bagian keuangan, menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi perlengkapan urusan rumah tangga dinas, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai serta penatausahaan kepegawaian lingkup dinas, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di sub bagian umum dan kepegawaian serta membuat laporan secara berkala.

Kepala Bidang Koperasi

1. *Kepala Bidang Koperasi*, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja bidang; mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang dilingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; membina dan mengkoordinir kepala seksi dilingkup bidang koperasi; membuat pedoman penyelenggaraan tugas bidang koperasi; menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan koperasi serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan

perkembangan usaha koperasi; mengkoordinasikan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan serta penertiban terhadap usaha yang berbadan hukum dan usaha perkoperasian; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang serta membuat laporan secara berkala.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Kepala Bidang Koperasi*, mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana perkoperasian;
 - c. Penyelenggaraan perkoperasian menyangkut kehidupan koperasi.

Kepala Seksi *Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi*

Kepala Seksi Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi, mempunyai tugas yaitu menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja seksi *Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi*; mengkoordinasikan dengan kepala bidang koperasi, kepala seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup seksi; melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perkoperasian; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada seksi *Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi* serta membuat laporan secara berkala.

Kepala Seksi *Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*

Kepala Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, mempunyai tugas menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja seksi *Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*; mengkoordinasikan dengan kepala bidang koperasi, kepala seksi *Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi*; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup seksi; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada fasilitasi permodalan, serta membuat laporan secara berkala.

Kepala Bidang UMKM

1. *Kepala Bidang UMKM*, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja bidang; mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang dilingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; membina dan mengkoordinir kepala seksi dilingkup bidang UMKM, membuat pedoman penyelenggaraan tugas bidang UMKM; menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dan perluasan jaringan akses serta pola kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang serta membuat laporan secara berkala.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Kepala Bidang UMKM*, mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan ekonomi masyarakat skala mikro, kecil dan menengah;
 - b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasikan perluasan akses dan jaringan pola kemitraan dan investasi bidang usaha skala mikro kecil dan menengah.

Kepala Seksi Kelembagaan UMKM

Kepala Seksi Kelembagaan UMKM, mempunyai tugas menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja seksi Kelembagaan UMKM; mengkoordinasikan dengan kepala bidang UMKM, kepala seksi Pembinaan UMKM dan kepala seksi verifikasi; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup seksi Kelembagaan UMKM; melaksanakan pembinaan teknis usaha perekonomian, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada seksi usaha perekonomian serta membuat laporan secara berkala.

Kepala Seksi Usaha dan Promosi UMKM

Kepala Seksi Usaha dan Promosi UMKM, mempunyai tugas menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja seksi Usaha dan Promosi UMKM; mengkoordinasikan dengan kepala bidang UMKM, kepala Kelembagaan UMKM; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup seksi; melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada seksi pembinaan UMKM serta membuat laporan secara berkala.

Kepala Bidang Tenaga Kerja

1. *Kepala Bidang Tenaga Kerja*, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja bidang; mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang dilingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, membina dan mengkoordinir kepala seksi dilingkup bidang Tenaga Kerja, membuat pedoman penyelenggaraan tugas bidang Tenaga Kerja, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang serta membuat laporan secara berkala.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Kepala Bidang Tenaga Kerja*, mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Seksi Pengawasan dan Perlindungan Kerja;
 - b. Penyelenggaraan dan pembinaan Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja.

Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja, mempunyai tugas menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja seksi;

mengkoordinasikan dengan kepala bidang Tenaga Kerja dan kepala seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup seksi; melaksanakan pembinaan teknis, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugasseksi, serta membuat laporan secara berkala.

Kepala Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja

Kepala Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja, mempunyai tugas menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja seksi; mengkoordinasikan dengan kepala bidang Tenaga Kerja dan kepala seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup seksi; melaksanakan pembinaan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugasseksi, serta membuat laporan secara berkala.

Kepala Bidang Transmigrasi

1. *Kepala Bidang Transmigrasi*, mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja bidang; mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang dilingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membina dan mengkoordinir kepala seksi dilingkup Bidang Transmigrasi, membuat pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Transmigrasi, menyelenggarakan pembinaan; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang serta membuat laporan secara berkala.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Kepala Bidang Transmigrasi*, mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan dan pembinaan Seksi Pemberdayaan Kawasan dan Penempatan Transmigrasi;
 - b. Penyelenggaraan dan pembinaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.

Kepala Seksi Pemberdayaan Kawasan dan Penempatan Transmigrasi

Kepala Seksi Pemberdayaan Kawasan dan Penempatan Transmigrasi, mempunyai tugas menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja seksi; mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Transmigrasi dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup seksi; melaksanakan pembinaan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, mempunyai tugas menyiapkan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja anggaran satuan kerja seksi; mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Transmigrasi dan Kepala Seksi Pemberdayaan Kawasan dan Penempatan Transmigrasi; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup seksi; melaksanakan pembinaan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas seksi serta membuat laporan secara berkala.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas, unsur staf yaitu sekretariat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Unsur pelaksana pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi antara lain :

- a. Bidang Koperasi, membawahi 2 Seksi :
 - Seksi *Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi*
 - Seksi *Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*
- b. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membawahi 2 Seksi :
 - Seksi *Kelembagaan UMKM*
 - Seksi *Usaha dan Promosi UMKM*

- c. Bidang Tenaga Kerja, membawahi 2 Seksi :
 - Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
 - Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja
- d. Bidang Transmigrasi, membawahi 2 Seksi :
 - Seksi Pemberdayaan Kawasan dan Penempatan Transmigrasi
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan urusan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 36 orang PNS dan 13 orang Non PNS, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel.2.1. Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2017

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	Kepala	II/b	1	-	1
2.	Sekretaris	III/a	1	-	1
	a. Kasubbag. Perencanaan	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	2	2	5
	b. Kasubbag. Keuangan	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	4	2	6
	c. Kasubbag. Umum dan Kepeg.	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	4	1	5
3.	Kabid. Koperasi	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	-	1	1
	b. Kasi. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	IV/a	1	-	1
	- Staf	IV/a	1	1	2
4.	Kabid. UMKM	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Kelembagaan UMKM	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	-	1	1
	b. Kasi. Usaha dan Promosi UMKM	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	1	1	2
5.	Kabid. Tenaga Kerja	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Pengawasan dan Perlin- dungan Tenaga Kerja	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	2	1	3
	b. Kasi. Pemberdayaan Tenaga Kerja	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	2	1	3

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
6.	Kabid. Transmigrasi	III/b	1	-	1
	a. Kasi. Pemberdayaan Kawasan & Penempatan Transmigrasi	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	1	1	2
	b. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	IV/a	1	-	1
	- Staf	-	2	1	3

Sedangkan untuk tingkat pendidikan Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	5	3	5
4.	Sarjana Muda	1	2	3
5.	Strata 1 (S1)	11	20	31
6.	Strata 2 (S2)	7	-	7
7.	Strata 3 (S3)	-	-	-
Jumlah		24	25	49

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi didukung oleh sarana dan Prasarana, dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel. 2.2. Gambaran Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2017

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Gedung Kantor	Paket	1	√	-	-
2.	Mobil	Unit	1	√	-	-
3.	Motor	Unit	10	√	-	-
4.	Kursi kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
5.	Meja kerja Pejabat Eselon II	Buah	1	√	-	-
6.	AC	Set	14	12	2	-
7.	Kursi hadap	Buah		√	-	-
8.	Papan Struktur	Buah	0	√	-	-
9.	Rak kayu	Buah		-	√	-
10.	Kursi Putar	Buah		√	-	-
11.	Meja kerja pejabat eselon III	Buah	5	5		-
12.	Kursi rapat	Buah		√	-	-
13.	Kursi kerja Peg. Non Struktural	Buah		15	2	2
14.	Kipas Angin	Buah	1		1	
15.	Komputer & Laptop	Unit	23	10	5	8
16.	Bupet Kayu/kaca	Buah		-	2	-
17.	Mesin Ketik	Buah	0	-		
18.	Warles	Unit	1		-	
19.	Cermin hias	Buah	1	1	-	-
20.	Papan uraian tugas	Buah	0		-	-
21.	Meja kerja peg. Non struktural	Buah		8	-	-
22.	Meja rapat	Buah	1	4	-	-

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
23.	Kursi kerja pejabat eselon III	Buah	5	5	-	-
24.	Kursi futura	Buah		3	-	-
25.	Lemari arsip	Buah		3	1	-
26.	Meja kerja eselon IV	Buah	11	11	-	-
27.	Kursi kerja eselon IV	Buah	11	11	-	-
28.	Printer	Buah	18	2	2	14
29.	Camera	Buah		1	-	-
30.	Faximile	Buah		1	-	-
31.	Tabung Gas	Buah	1	1	-	-
32.	Kompor Gas	Buah		1	-	-
33.	Dispenser	Buah		3	-	-
34.	Kulkas	Buah	1	1	-	-
35.	Rak Piring	Buah		1	-	-
36.	Kursi kerja pimpinan	Buah		1	-	-
37.	Kursi rapat pimpinan	Buah		5	-	-
38.	Kursi tamu	Set		1	-	-
39.	Meja kerja pimpinan	Buah		1	-	-

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI

Program yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan urusan dan pencapaian target pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir sejak tahun 2009 sampai dengan 2013, lihat table 2.3.

No.	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra BAPPEDA					Realisasi Capaian				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	Tersusunnya informasi capaian target kinerja program/kegiatan				2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
2	Tersusunnya profil daerah				-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3	Tersusunnya laporan movev				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tersusunnya laporan movev DAK				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Tersedianya dokumen kebijakan penganggaran				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tersusunnya laporan Strategi penanggulangan kemiskinan daerah				1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Tersusunnya dokumen administrasi pendukung pendirian akademi komunitas				-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Peningkatan kemampuan pemahaman dalam penyusunan renstra dan renja SKPD				1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur dan program pendampingan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Tersusunnya informasi capaian target kinerja program/kegiatan				2	2	2	2	3	2	2	2	2	3
2	Tersusunnya profil daerah				-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
3	Tersusunnya laporan movev				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Tersusunnya laporan movev DAK				-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Tersedianya dokumen kebijakan penganggaran				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Tersusunnya laporan Strategi penanggulangan kemiskinan daerah				1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Strategis Dinas;
- b. Menyusun dan menetapkan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- c. Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
- d. Mengkoordinasikan dengan Sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- e. Mengarahkan pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- f. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- g. Menyelenggarakan proses penerbitan Kartu AK.1 dibidang Tenaga Kerja;
- h. Menyelenggarakan Proses pelayanan BPJS Kecelakaan Kerja di bidang Tenaga Kerja ;
- i. Melaksanakan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri (HI) di Bidang Tenaga Kerja;
- j. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- k. Menyelenggarakan Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan memfasilitasi peran serta masyarakat di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- l. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

- m. Menjalin kerjasama dengan pemanfaat dan pemerhati di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- n. Menyampaikan telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala;
- q. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
- r. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

1. Telaahan Renstra Provinsi dan K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran Pada Renstra SKPD. Prov.	Sasaran Pada Renstra K/L
1.	Peningkatan jumlah koperasi berskala besar	Terciptanya lapangan kerja dan penciptaan Wirausaha baru melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta pembukaan Kawasan transmigrasi	Dapat meningkatkan penyelenggaraan pembangunan Nasional yang tersistem, terstruktur dan terukur melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta meningkatnya kualitas tenaga kerja yang dapat diandalkan pada pasar bebas	
2.	Peningkatan Jumlah usaha menengah menjadi besar			
3.	Peningkatan jumlah usaha kecil menjadi menengah			
4.	Peningkatan Jumlah KUMKM yang terfasilitasi Diklat			
5.	Peningkatan jumlah KUMKM yang terfasilitasi kelembagaan Keuangan			

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku	Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD	Arah an Lokasi Pelayanan SKPD
1.	Kawasan usaha koperasi dan UMKM serta transmigrasi	<i>Wilayah I : Maritengngae dan Watang Sidenreng</i>	Sebagai wilayah pengembangan ternak unggas, industri alat-alat pertanian seperti Hand Traktor, perontok padi dan RMU, perikanan, pengrajin batu	Positif	Sebagai wilayah pengembangan ternak unggas, industri alat-alat pertanian seperti Hand Traktor, perontok padi dan RMU, perikanan dan pengrajin Batu
		<i>Wilayah II : Pitu Riawa, Dua PituE dan Pitu Riase</i>	Sebagai wilayah pengembangan ternak sapi, unggas dan transmigrasi	Positif	Sebagai wilayah pengembangan ternak sapi, unggas dan transmigrasi
		<i>Wilayah III : Watang Pulu, Tellu LimpoE dan Panca Lautang</i>	Sebagai Wilayah pengembangan usaha pandai besi, batu merah, beras, mente, pemintalan sutera, perikanan	Positif	Sebagai wilayah pengembangan usaha pandai besi, batu merah, beras, mente, pemintalan sutera, perikanan
		<i>Wilayah IV : Panca Rijang, Baranti, dan Kulo</i>	Sebagai wilayah pengembangan usaha ternak unggas, penggilingan padi, gula merah, perikanan, kerajinan tangan	Positif	Sebagai wilayah pengembangan usaha ternak unggas, penggilingan padi, gula merah, perikanan

3. Analisis KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan SKPD	Catatan bagi Program/Kegiatan SKPD
1.	Pengangguran	Tingkat pengangguran yang masih tinggi disebabkan kurangnya pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah	Upaya yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pelatihan keterampilan tenaga kerja, sosialisasi, pembinaan kelembagaan dan pelatihan Koperasi, UMKM serta penempatan transmigrasi	Peningkatan pembinaan kelembagaan dan pelatihan Koperasi, UMKM serta menciptakan wirausaha baru berbasis desa/kelurahan
2.	Pencemaran udara	Aktivitas UMKM dan Industri Kecil Menengah menyumbang kontribusi pada tingkat pencemaran udara tergolong tinggi	Langkah yang dapat dilakukan dengan pencegahan dan pengendalian terhadap sumber-sumber pencemaran baik yang bergerak maupun tidak bergerak	Peningkatan Sosialisasi dan pelatihan pola pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM dan Industri Kecil Menengah
3.	Sumber daya air	Penggunaan air tanah yang semakin meningkat oleh UMKM dan Industri Kecil Menengah	Pencegahan dan pengendalian penggunaan air tanah dapat dilakukan dengan melaksanakan pendekatan dan konservasi terhadap sumber air yang digunakan UMKM dan Industri Kecil Menengah	Peningkatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan UMKM dan Industri Kecil Menengah terhadap penggunaan air tanah
4.	Pencemaran air	Pembuangan limbah UMKM dan Industri Kecil Menengah tanpa perhitungan yang matang dapat mempengaruhi tingkat pencemaran air di sekitarnya	Upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi pembuangan limbah dengan melaksanakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap usaha UMKM dan Industri Kecil Menengah	Peningkatan fasilitasi bagi UMKM dan Industri Kecil Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan SKPD	Catatan bagi Program/Kegiatan SKPD
5.	Konflik Sosial	Kebutuhan lahan untuk kawasan perdagangan produk yang semakin sulit didapatkan dan hanya bisa dilaksanakan melalui pembebasan lahan yang sering mengakibatkan konflik antara warga dengan Tim Pemerintah akibat tidak adanya kesepakatan harga dengan nilai saat ini dan jaminan harga dan kualitas produksi yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah	Antisipasi yang dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif dan manusiawi kepada warga dan pemilik lahan untuk mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang digunakan dan melakukan operasi pasar secara kontinyu	Peningkatan koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen, pengawasan peredaran barang jasa, tera ulang dan operasi pasar serta peningkatan pembangunan pasar

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD ini dilihat berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Koperasi, UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Dinas, menjalian dan mengkoordinasikan Sekretariat Dinas dan Bidang-Bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan teknis di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Tugas lain yang diserahkan oleh Bupati, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Dinas Koperasi, UMM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta membuat laporan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diperhadapkan kepada isu-isu strategis. Isu Strategis merupakan salah satu variabel yang menjadi acuan dalam penyusunan suatu perencanaan dan isu ini kemudian dijabarkan dalam program. Isu strategis muncul dan berkembang dalam masyarakat dan menjadi suatu permasalahan pembangunan. Isu strategis ini jika tidak diakomodir maka akan menjadi suatu masalah. Penyampaian isu biasanya melalui Musrenbang dan hasil kunjungan dilapangan. Dengan demikian setiap isu menjadi catatan bagi organisasi atau SKPD untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah program.

Pada Bidang Koperasi isu strategis adalah pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengurus dalam mengelola koperasi, kepastian hukum (*reward and punishment*) kepada organisasi dan manajemen koperasi, dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Pada Bidang UMKM isu strategisnya adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan tambahan modal, regulasi, maupun penataannya, pembentukan wirausaha berbasis desa/kelurahan dalam mendukung pembukaan lapangan kerja baru.

Tidak tersedianya data ketenagakerjaan yang real; Tidak tersedianya sarana dan prasarana Bursa Kerja Online (BKOL); Kurangnya lembaga atau institusi yang mempunyai bidang keterampilan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan lokal. Pengelolaan potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan sering dihadapkan dengan ekonomi kapitalis yang telah menguasai pasar, modal dan akses keuangan lainnya.

Terpusatnya mobilitas penduduk di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan, sehingga terjadi ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang potensial; Kurangnya infrastruktur jalan dan jembatan (kualitas dan kuantitas) di kawasan Transmigrasi;

Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diperlukan data dan informasi yang aktual. Informasi ini merupakan suatu kebutuhan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya menyangkut sembilan bahan pokok (Sembako). Hal ini penting untuk mengetahui harga melalui media elektronik.

Untuk itu dapat dicermati dan diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal, lihat tabel 3.1.

Aspek Kajian	Capaian Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
Evaluasi Pelayanan SKPD 1. Sekretariat	<p>Terciptanya prosentase rata-rata terselesaikan dan sampai tujuan</p> <p>Tersedianya kebutuhan terhadap jaringan komunikasi, penerangan dan air cukup signifikan</p> <p>Terciptanya kelancaran tugas-tugas</p> <p>Lancarnya aplikasi pengelolaan keuangan Gaji</p> <p>Lancarnya tugas-tugas operasional</p> <p>Kesejahteraan Pegawai/Staf meningkat</p> <p>Keindahan Kantor</p> <p>Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>Tersedianya barang-barang cetakan dan lembaran foto copy</p> <p>Meningkatnya Kapasitas tenaga listrik</p> <p>Meningkatnya Minat Baca</p> <p>Rapat/pertemuan berjalan lancar</p> <p>Konsultasi berjalan lancar</p> <p>Memperlancar kegiatan administrasi perkantoran</p> <p>Menunjang kelancaran tugas-tugas administrasi perkantoran</p> <p>Terwujudnya Penimbunan Halaman</p> <p>Meningkatnya sarana Kerja</p> <p>Lancarnya Penerimaan dan Pengiriman Surat</p> <p>Meningkatnya kebutuhan sehari-hari</p> <p>Terciptanya ruangan yang indah</p> <p>Penataan Kantor</p> <p>Lancarnya tugas-tugas operasional</p> <p>Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan</p> <p>Munculnya Wirausaha yang mampu bersaing</p> <p>Meningkatnya Kemampuan berusaha yang pada akhirnya tercipta koperasi baru</p> <p>Meningkatnya kemampuan pengelola keuangan</p> <p>Meningkatnya sarana pemasaran produk UMKM</p> <p>Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi</p> <p>Peningkatan pendataan UMKM</p> <p>Peningkatan pembinaan terhadap Koperasi</p> <p>Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pemahaman perkoperasian</p> <p>Terwujudnya P2WKSS dalam masyarakat</p>			

	<p>Meningkatnya jaringan kerjasama usaha koperasi Lancarnya Laporan hasil monitoring dan evaluasi Meningkatnya pengembalian dana PEK dari koperasi Meningkatnya volume usaha, Koperasi/USP dan UKM Meningkatnya modal kerja koperasi, kelompok produktif masyarakat, UKM Adanya peningkatan volume usaha Koperasi/UKM Meningkatnya koperasi yang mengikuti bimbingan koperasi Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi Peningkatan klasifikasi koperasi Peningkatan SDM Koperasi Terciptanya iklim UMKM yang kondusif Meningkatnya produktivitas industri kecil menengah Meningkatnya akses permodalan bagi dunia usaha industri dan perdagangan kecil dan menengah Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi pengrajin di bidang teknologi industri kecil kerajinan dan rumah tangga Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu rumah tangga dalam pembuatan berbagai jenis produk olahan dari ikan gabus (sosis, bakso dan nugget) Meningkatnya kemampuan IKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Propinsi maupun pusat Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengrajin di bidang industri kecil kerajinan dan rumah tangga Peredaran barang jasa terevaluasi dan lancar Konsumen memahami hak dan kewajibannya Alat UTTP yang digunakan tera ulang sesuai ketetapan Pelayanan prima terhadap pendaftaran perusahaan dan monitoring dan pengawasan TDP Hambatan Pendistribusian dapat teratasi Masyarakat mendapatkan Informasi Pasar lebih mudah Masyarakat memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau Adanya Pengusaha yang memenuhi kewajiban Adanya Peningkatan investasi di Kab. Sidrap</p>			
--	---	--	--	--

	Terlaksananya pelayanan perizinan Peningkatan PAD Peningkatan Pendapatan masyarakat			
--	---	--	--	--

3.2. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

No.	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Misi II : Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM			
	Program : 1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 3. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 5. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 6. Peningkatan dan Produktifitas Tenaga Kerja 7. Peningkatan Kesempatan Kerja 8. Perlindungan, Pengembangan Ketenagakerjaan 9. Pengembangan wilayah Transmigrasi	1. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi 2. Kualitas SDM yang masih rendah 3. Iklim usaha kecil menengah belum kondusif 4. Kewirausahaan yang berbasis desa/kelurahan belum merata 5. Sistem pendukung usaha bagi UMKM belum Kondusif 6. Belum adanya data pengangguran yang akurat	1. Adanya Legislati yang mengatur tentang Koperasi dan UMKM 2. Jumlah Koperasi dan UMKM cukup besar 3. Dukungan Permodalan bagi Koperasi dan UMKM dari Lembaga Keuangan dan Non Bank sangat besar 4. Wirausaha yang berbasis desa/kelurahan semakin meningkat 5. Usaha UMKM yang semakin produktif 6.	1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap legislasi yang mengatur tentang Koperasi dan UMKM 2. Kuarangnya pengetahuan pengurus Koperasi dan UMKM 3. Kurangnya Pemahaman Pengurus Koperasi dan UMKM dalam mengurus permodalan 4. Terbatasnya pengetahuan masyarakat yang semakin produktif 5. Adanya pendampingan pengembangan dan pemasaran produk berupa pelaksanaan Tera 6. Adanya kerjasama dengan instansi pembina 7. Adanya pendampingan, pengembangan dan pemasaran produk unggulan 8. Jumlah industri

No.	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
2.	Misi VI : Mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment			
	Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan disiplin aparatur	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran belum maksimal 2. Kualitas Perencana yang masih kurang dan penganggaran yang masih terbatas 3. Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah	1. Regulasi adm. Perkantoran yang baik 2. Dukungan pimpinan yang tinggi 3. Disiplin aparatur masih rendah	1. SDM aparatur yang masih rendah 2. Kualitas aparatur perencana rendah 3. Sistem yang mengatur kehadiran sudah memadai
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4. Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Belum optimalnya pelaporan-pelaporan	4. Tingkat kesejahteraan masih rendah 5. Sarana dan prasarana penunjang belum maksimal	4. Penganggaran yang masih terbatas 5. Kurangnya pemahaman terhadap acuan pelaporan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok dan isu-isu strategis mengacu kepada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025, maka dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT”.

Visi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan akan fokus dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengerahkan dan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih juga diarahkan untuk menuju kota perdagangan dan jasa yang maju dan modern.

- **Maju** : Mengandung makna adanya perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Momentum pertumbuhan ekonomi yang tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional akan menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat didukung oleh peningkatan kualitas infra struktur yang menciptakan kelancaran aksesibilitas antar wilayah, disertai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik pula secara simultan menciptakan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

- **Terkemuka** : Mengandung makna adanya kemajuan dalam sektor yang menjadi unggulan sehingga menjadi contoh bagi daerah lain, bahkan mampu mempengaruhi kondisi sektor yang sama di daerah lain. Apakah dari sisi produksi Kabupaten Sidenreng Rappang mampu mensuplay daerah lain, atau dari sisi penerapan teknologi lebih maju sehingga mampu menginspirasi masyarakat di daerah lain dalam mengembangkan sektor yang sama. Beberapa sektor yang sudah sangat maju dan membuat Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal misalnya produksi padi dan telur ayam. Dan beberapa potensi yang dapat berkembang cepat seperti sapi dan beberapa produk perkebunan, serta pemanfaatan energi baru terbarukan melalui Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sekam dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin.

- **Religius** : Mengandung makna kondisi masyarakat yang kuat dan teguh memegang nilai-nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain.

- **Pendapatan Dua Kali Lipat** : Mengandung makna bahwa dalam jangka waktu 5 tahun periode 2014-2018, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang akan meningkat dua kali lipat.

3.3. MISI

Misi membangun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 yang diemban untuk mensejahterakan masyarakat sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan;** sekaligus dianalogikan sebagai mewakili komponen Lantai bangunan.

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian ditempatkan sebagai misi pertama, karena rata-rata 48 persen Perekonomian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari sektor pertanian. Khususnya pertanian tanaman pangan. Dan sudah mulai pula berkembang sektor usaha tani yang lain secara terintegrasi seperti Jagung, Ayam Petelur, Sapi, dan beberapa komoditi infrastruktur, sumber energi, dan dukungan permodalan mendorong tumbuhnya industri Pengolahan dan kegiatan produktif lainnya yang mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah sektor pertanian.

- 2. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM;** sekaligus dianalogikan mewakili komponen dinding bagian depan dari bangunan.

Kegiatan usaha tani yang memproduksi bahan mentah biasanya mempunyai resiko ban biaya yang cukup tinggi sehingga nilai tambahnya masuh relativ rendah. Oleh karena itu perlu didorong agar petani dan masyarakat melakukan kegiatan “**PETIK**”, “**OLAH**”, **DAN** “**JUAL**”. Oleh karena itu dengan mendorong tumbuhnya UMKM, disertai pelatihan dan dukungan permodalan, dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan dan percepatan gerak roda perekonomian masyarakat.

- 3. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan.** Dianalogikan mewakili komponen dinding sisi kanan bangunan.

Tersedianya sumberdaya alam yang melimpah tidak akan dapat secara langsung memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan rakyat jika tidak tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara efektif dan efisien. Dan hanya sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup yang bisa mengelola sumberdaya

alam yang ada itu secara efektif dan efisien. Ini akan didukung oleh keberadaan perguruan tinggi negeri berbasis ilmu pertanian dan lembaga lain baik swasta maupun negeri akan sangat membantu melahirkan sumber daya manusia yang terampil.

4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah; selanjutnya dianalogikan sebagai komponen dinding sisi kiri bangunan

Searah dengan rencana visi jangka panjang, untuk menciptakan wilayah yang mandiri, diperlukan tersedianya infrastruktur jalan, jembatan, dan telekomunikasi yang memadai sehingga memudahkan arus pergerakan orang, barang dan informasi ke semua wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Infrastruktur yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya akan melahirkan efisiensi. Efisiensi menciptakan daya saing, dan daya saing menciptakan kualitas.

5. Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, digambarkan mewakili komponen dinding bagian belakang bangunan

Salah satu pra syarat dapat melaksanakan program-program pembangunan adalah “Keamanan dan Ketertiban yang terkendali”. Aktifitas ekonomi akan terganggu jika keamanan dan ketertiban juga terganggu. Keresahan akan muncul dimana – mana jika terjadi konflik. Oleh karena itu menjadi penting untuk menciptakan dan menjaga kondisi kehidupan sosial yang kondusif.

6. Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan Kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment. Dalam konteks analogi membangun rumah impian, digambarkan mewakili komponen atap bangunan yang kokoh.

Masyarakat dengan segala dinamikanya memiliki berbagai macam potensi konflik dan pertentangan kepentingan. Oleh karena itu diperlukan kehadiran pemerintah yang mampu melayani, memfasilitasi, dan melindungi kepentingan masyarakat. Diperlukan hadirnya pemerintahan yang melindungi golongan yang tidak berdaya, peka terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Pro gender, dan mampu mengelola sumber daya pembangunan secara berkelanjutan.

3.4. IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS (EKSTERNAL)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain - Lain
1.	1. Pemulihan ekonomi dunia 2. Perubahan iklim 3. Adanya Negara raksasa ekonomi baru 4. Pasar bebas	1. Teralokasinya dana kementerian yang dapat dimanfaatkan untuk pembinaan, pelatihan dan pengembangan serta pengadaan sarana prasarana 2. Terbitnya peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur revitalisasi kelembagaan koperasi dan UMKM yang dapat mendorong perkembangan koperasi dan UMKM 3. Terselenggaranya ajang promosi dan pameran sebagai pengenalan produk unggulan daerah	1. Terbitnya peraturan gubernur untuk mendorong pengembangan koperasi dan UMKM 2. Komitmen Dinas Koperasi dan UMKM untuk pembinaan dan bantuan modal di sector koperasi dan UMKM 3. Terselenggaranya event promosi dan pameran tingkat propinsi untuk memperkenalkan produk unggulan daerah 4. Pemanfaatan kemitraan dalam menyalurkan modal kerja 5. Perbaikan infrastruktur 6. Peningkatan nilai tambah produk industry 7. Pemanfaatan energy terbarukan 8. Penciptaan lapangan kerja 9. Pencegahan produk illegal melalui penerapan HAKI dan SNI	

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan (*Future From The Future*), ke mana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yaitu “ **MEWUJUDKAN KOPERASI SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN UMKM YANG DIDUKUNG PENINGKATAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT EKONOMI**”

4.2. MISI

Misi merupakan penjabaran dari Visi, untuk memenuhi Visi tersebut maka disusunlah Misi. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Organisasi (Instansi Pemerintah) agar tujuan Organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Dengan pernyataan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*), sehingga punya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap program-program yang dituangkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dapat terlaksana dengan sebaik - baiknya sesuai dengan RPJMD dan rencana strategis.

Adapun Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia koperasi dan UMKM.
- b. Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan bagi Koperasi dan UKM.

- c. Melaksanakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi bagi usaha Koperasi dan UKM.
- d. Fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan Koperasi dan UKM.
- e. Meningkatkan Pelayanan, Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- f. Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi baru, Pemerataan Pemukiman dan Mobilitas Penduduk.

4.3. TUJUAN

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan tujuan strategis berdasarkan Visi, Misi yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
- b. Meningkatkan jaringan Usaha dan Kemitraan
- c. Meningkatkan Pembiayaan dan Pengawasan
- d. Peningkatan Sarana Prasarana produksi bagi usaha koperasi dan UKM
- e. Meningkatkan Pemasaran dan promosi produk-produk unggulan Koperasi, UMKM
- f. Terciptanya Pengembangan Peningkatan Angkatan Kerja dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- g. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Wilayah Transmigrasi

4.4. SASARAN

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan Visi, Misi, Tujuan yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan strategis dan merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program.

Adapun Sasaran yang telah ditetapkan sebagai Berikut :

- a. Meningkatnya dan memantapkannya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia
- b. Meningkatnya pola kemitraan antar koperasi dan BUMN
- c. Meningkatnya pembiayaan dan Pengawasan
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana produksi bagi usaha Koperasi dan UKM
- e. Meningkatnya pemasaran dan promosi produk-produk unggulan Koperasi, UMKM
- f. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- g. Peningkatan Kesempatan Kerja
- h. Peningkatan upaya Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan
- i. Peningkatan Percepatan Kemandirian Warga Transmigrasi
- j. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Warga Transmigrasi.

Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan yang cocok.

Kebijakan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya dan memantapkannya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM.
- b. Terfasilitasinya pembiayaan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM.
- c. Terciptanya Pengembangan produksi bagi usaha Koperasi dan UMKM
- d. Terfasilitasinya pemasaran dan promosi produk-produk unggulan Koperasi, UMKM dan Industri.
- e. Terwujudnya pembiayaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan UKM
- f. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja.
- g. Terwujudnya Pengembangan Lapangan Kerja dan Usaha.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke...				
				2014	2015	2016	2017	2018
12.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur dalam menunjang kelancaran tugas-tugas	Peningkatan Pemeliharaan Gedung Kantor	100 %	-	-	-	-
13.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur dalam menunjang kelancaran tugas-tugas	Peningkatan Jumlah aset, keamanan kantor	100 %	100 %	-	100 %	-
14.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur dalam menunjang kelancaran tugas-tugas	Peningkatan Jumlah Aset/Peralatan gedung kantor	100 %	-	-	100 %	-
15.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur dalam menunjang kelancaran tugas-tugas	Peningkatan Jumlah Aset/Mebeleur	-	100 %	-	-	-
16.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur dalam menunjang kelancaran tugas-tugas	Peningkatan keindahan gedung kantor/penghias ruangan Rumah Tangga	-	100 %	-	-	-
17.	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan Prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas	Peningkatan pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur/ gedung kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
18.	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan Prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas	Peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	10 unit	13 unit	15 unit	17 unit	19 unit
19.	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan Prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur/ perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
20.	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan Prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas	Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	-	-	100 %	100 %	100 %
21.	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan Prasarana aparatur	Terpeliharanya sarana aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas	Peningkatan pemeliharaan mebeleur	-	-	100 %	100 %	100 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke...				
				2014	2015	2016	2017	2018
35.	Meningkatkan pembiayaan dan pengawasan	Meningkatnya pembiayaan dan pengawasan	Terwujudnya tata kelola kelembagaan	15 Kelompok	25 Kelompok	27 Kelompok	28 Kelompok	5 Kelompok
36.			Tersedianya fasilitas pembiayaan UMKM	-	2 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
37.			Tersedianya bantuan modal usaha untuk pengembangan UMKM	-	20 UMKM	20 UMKM	20 UMKM	20 UMKM
38.			Terciptanya UMKM percontohan	-	-	1 Bidang Usaha	1 Bidang Usaha	1 Bidang Usaha
39.	Peningkatan sarana prasarana produksi bagi usaha koperasi dan UKM	Meningkatnya sarana dan prasarana produksi usaha koperasi & UKM	Terciptanya daya saing UKM	-	150 Unit	170 Unit	180 Unit	-
40.			Tersedianya akses teknologi tepat guna bagi UMKM	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
41.	Meningkatkan pemasaran & promosi produk-produk unggulan koperasi & UKM	Meningkatnya pemasaran dan promosi produk-produk unggulan koperasi & UKM	Terbangunnya Galeri UMKM	-	-	50 %	25 %	25 %
42.			Terwujudnya promosi, pameran, pemasaran dan pengembangan	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
43.	Terciptanya pengembangan Peningkatan angkatan kerja dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenagakerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Tercapainya pendidikan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	16 AK	20 AK	20 AK	20 AK	20 AK
44.		Peningkatan kesempatan kerja	Tersedianya pelayanan ketenagakerjaan melalui bursa kerja online	-	sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas petugas BKOL	Pelaksanaan bursa kerja online	Pelaksanaan bursa kerja online
45.			Terciptanya tenaga kerja yang terampil dan siap kerja/wirausaha	135 AK	150 AK	175 AK	200 AK	200 AK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke...				
				2014	2015	2016	2017	2018
46.		Peningkatan upaya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Tercapainya perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	-	20 perusahaan	20 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan
47.	Peningkatan Pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	Peningkatan percepatan kemandirian warga transmigrasi	Terciptanya pengembangan wilayah transmigrasi	100%	100%	100%	100%	100%
48.		Peningkatan pertumbuhan ekonomi warga transmigrasi	Tersedianya sarana prasarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4. 2 Rumusan Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis SKPD

Visi : "MEWUJUDKAN KOPERASI SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN UMKM YANG DIDUKUNG PENINGKATAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT EKONOMI"			
Misi I : Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia koperasi dan UMKM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	1. Meningkatnya dan memantapkannya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta UMKM 2. Meningkatkan Pelatihan dan penyuluhan terhadap UMKM dan Koperasi 3. Melaksanakan fasilitasi sistem pendukung usaha bagi UMKM 4. Melaksanakan Pendataan, moni toring dan evaluasi UMKM 5. Melaksanakan Fasilitasi UMKM yang menjalin kemitraan 6. Melaksanakan Pembentukan dan pembinaan wirausaha baru 7. Menciptakan pembukaan lapangan kerja baru 8. Melaksanakan peningkatan jumlah skala UMKM 9. Melaksanakan Pembinaan tata kelola kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya dan memantapkannya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia koperasi dan UMKM 2. Terciptanya pengembangan produksi bagi UMKM 3. Terciptanya daya saing UMKM 4. Terbangunnya Galeri UMKM 5. Terlaksananya pendataan, monitoring dan evaluasi 6. Terlaksananya UMKM yang menjalin Kemitraan 7. Terbentuknya Wirausaha baru 8. Terbukanya lapangan kerja baru 9. Terwujudnya jumlah skala UMKM 10. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang baik
Misi II : Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan bagi Koperasi dan UKM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Jaringan Usaha dan Kemitraan 2. meningkatkan pembiayaan dan pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pola Kemitraan antar Koperasi dan BUMN 2. Meningkatnya pembiayaan dan pengawasan bagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pola Kemitraan Koperasi antar Koperasi, Koperasi dan BUMN 2. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terfasilitasinya pembiayaan dan permodalan bagi koperasi dan UMKM 2. Tersedianya fasilitas pembiayaan UMKM 3. Tersedianya

	usaha UMKM dalam mendukung kualitas dan kuantitas produk barang dan jasa	3. Melaksanakan fasilitasi ketersediaan bantuan modal usaha untuk pengembangan UMKM 4. Melaksanakan fasilitasi UMKM Percontohan	bantuan modal usaha untuk pengembangan UMKM 4. Terciptanya UMKM Percontohan
Misi III : Melaksanakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi bagi usaha Koperasi dan UKM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi bagi Usaha Koperasi dan UKM	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Produksi bagi Usaha Koperasi dan UKM	Pengembangan Sarana dan prasarana produksi bagi usaha koperasi dan UKM	Terciptanya pengembangan produksi bagi usaha Koperasi dan UMKM
Misi IV : Fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan Koperasi dan UKM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemasaran dan promosi produk produk unggulan koperasi dan UMKM	Meningkatnya pemasaran dan promosi produk produk unggulan koperasi dan UMKM	1. Melaksanakan dan mengikuti promosi, pameran, pemasaran dan pengembangan jaringan UMKM	1. Terwujudnya promosi, pameran, pemasaran, dan pengembangan jaringan UMKM
Misi V : Meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan tenaga kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya pengembangan Peningkatan angkatan kerja dalam rangka peningkatan kualitas dan produktivitas tenagakerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan sistem pelatihan keterampilan berusaha berbasis kompetensi bagi Angkatan Kerja khususnya pencari kerja	Meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan secara terpadu dan profesional serta melakukan Pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja
Misi VI Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru, pemerataan pemukiman , dan mobilitas penduduk			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	1. Peningkatan percepatan kemandirian warga transmigrasi 2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi warga transmigrasi melalui akses teknologi, SDM, pasar, kualitas produk dan permodalan bagi UMKM	1. Ketersediaan sarana dan prasarana berusaha bagi warga transmigrasi 2. Ketersediaan infrastruktur di wilayah transmigrasi untuk mendukung mobilitas penduduk dan hasil bumi	1. Pembinaan dan pelatihan bagi warga transmigrasi dalam rangka mengubah pola pikir dan cara berusaha 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah transmigrasi



BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Lima Tahun ke Depan Untuk melaksanakan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi lima tahun ke depan dan memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi menetapkan program lima tahun kedepan.

Isu strategis menjadi suatu keharusan dalam penganggarannya serta harus diprioritaskan menjadi program atau kegiatan. Dengan demikian menjadi suatu urusan yang bersifat strategis karena pengaruhnya yang sangat penting untuk dilaksanakan menjadi program prioritas. Program prioritas dapat ditinjau dari aspek strategis maupun operasional menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sedangkan dari nilai strategiknya pada tingkat kebijakan menjadi tanggung jawab bersama Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan Bupati.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis. Program prioritas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Lima Tahun ke Depan dalam melaksanakan visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tetap memperhatikan isu strategis serta kebutuhan dan kondisi umum organisasi, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam menetapkan program lima tahun kedepan sebagai berikut :

5.1. Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja				
										Tahun 2014		Tahun 2015		Target
										Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.365.984	100%	1.413.704	100%
			1	06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	100%	100%	5.925	100%	6.044	100%
			1	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100%	100%	36.000	100%	36.720	100%
			1	06	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Terlaksananya jasa jaminan kendaraan dinas/operasional BAPPEDA	100%	100%	8.342	100%	8.509	100%
			1	06	01	02	Penyediaan Jasa Adimistrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	100%	100%	801.740	100%	817.775	100%
			1	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	100%	100%	13.394	100%	13.662	100%
			1	06	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya dana perbaikan peralatan kerja	100%	100%	8.160	100%	8.323	100%
			1	06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	4.390	100%	4.478	100%

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian tahun ke ...					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan administrasi perkantoran :								
1.	Pelayanan Administrasi Surat Menyurat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Peningkatan jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Peningkatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5 Unit
4.	Peningkatan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	10 Unit	13 Unit	15 Unit	17 Unit	19 Unit	74 Unit
5.	Peningkatan administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Peningkatan kebersihan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Peningkatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Peningkatan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Peningkatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur :								
12.	Peningkatan pemeliharaan gedung kantor	100 %	100 %	-	-	-	-	100 %
13.	Peningkatan jumlah Asset, keamanan kantor	-	100 %	-	-	100 %	-	100 %

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian tahun ke ...					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
14.	Peningkatan jumlah Asset	100 %	100 %	-	-	-	-	100 %
15.	Peningkatan jumlah Asset	-	-	100 %	-	-	-	100 %
16.	Peningkatan keindahan gedung kantor	-	-	100 %	-	-	-	100 %
17.	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
18.	Peningkatan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
19.	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
20.	Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
21.	Peningkatan Pemeliharaan mebeleur	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Tingkat Kedisiplinan Aparatur								
22.	Peningkatan disiplin Pegawai/aparatur	-	-	-	100 %	-	-	100 %
23.	Peningkatan disiplin Pegawai/aparatur	-	-	-	-	100 %	-	100 %
Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
24.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Capaian Kinerja Keuangan								
25.	Peningkatan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tepat	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya Peningkatan Koperasi Aktif sebanyak 77 Koperasi								
26.	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi	-	-	10 Kali	10 Kali	10 Kali	10 Kali	40 Kali
27.	Terlaksananya kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	-	35 Koperasi					35 Koperasi
28.	Terlaksananya kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	25 Koperasi	20 Koperasi	30 Koperasi	37 Koperasi	40 Koperasi	152 Koperasi
29.	Terlaksananya Pembinaan kelembagaan dan usaha Koperasi	-	-	45 Koperasi	50 Koperasi	55 Koperasi	46 Koperasi	196 Koperasi
30.	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	-	-	-	-	20 Koperasi	25 Koperasi	45 Koperasi
31.	Terlaksananya kegiatan Studi banding	-	-	-	-	-	1 Kali	1 Kali

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian tahun ke ...					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM bagi pengelola Koperasi dan kelompok UKM							
32.	Terlaksananya kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan Koperasi	-	-	3 Kali/30 Orang	-	2 Kali/30 Orang	3 Kali/30 Orang	8 Kali/30 Orang
33.	Terlaksananya kegiatan Penyuluhan perkoperasian	-	2 Kali/30 Orang	4 Kali/30 Orang	6 Kali/30 Orang	6 Kali/30 Orang	6 Kali/30 Orang	24 Kali/30 Orang
34.	Terlaksananya kegiatan pelatihan organisasi dan manajemen Koperasi bagi pengelola Koperasi	-	-	-	3 Kali/30 Orang	-	3 Kali/30 Orang	6 Kali/30 Orang
36.	Terwujudnya Pemberian Modal Pengembangan Koperasi	-	-	-	15 Koperasi	20 Koperasi	-	35 Koperasi
	Terwujudnya Kapasitas SDM. UMKM,							
	Terwujudnya kapasitas SDM. UMKM	40 Org. terlatih	120 Org. terlatih	0,002 %	0,47 %	0,35 %	0,35 %	1,172 %
	terbentuknya wirausaha baru berbasis desa/Kel, terbukanya lapangan kerja baru							
	Terbentuknya wirasusaha baru berbasis desa/kel.	-	-	4,28 %	5,71 %	8,57 %	10 %	28,56 %
	Terbentuknya lapangan kerja baru	-	-	8,57 %	10 %	11,43 %	12,85 %	42,85 %
	terwujudnya jumlah skala UMKM							
	Terwujudnya jumlah skala UMKM	-	-	-	0,14 %	0,20 %	0,23 %	0,57 %
	Terlaksananya pendataan, monitoring dan evaluasi							
	Terlaksananya pendataan, monitoring dan evaluasi UMKM	-	2.700 UMKM	64,34 %	74,69 %	87,14 %	100 %	100 %
	Terlaksananya kegiatan Temu Usaha kemitraan							
	Terlaksananya kegiatan Temu Usaha kemitraan	-	-	-	2 Kali/30 Orang	1 Kali/30 Orang	1 Kali/30 Orang	4 Kali/30 Orang
	Terlaksananya UMKM yang menjalin kemitraan							
	Terciptanya UMKM yang menjalin kemitraan	-	-	-	30 %	35 %	35 %	100 %
	Terwujudnya tata kelola kelembagaan							
	Terwujudnya tata kelola kelembagaan	-	-	-	4,81 %	14,45 %	0,47 %	19,73 %
	Tersedianya fasilitas pembiayaan UMKM							
	Tersedianya fasilitas pembiayaan UMKM	-	-	-	0,11 %	0,35 %	19,27 %	19,73 %
	Tersedianya bantuan modal usaha untuk pengembangan UMKM							
	Tersedianya bantuan modal usaha untuk pengembangan UMKM	-	-	-	0,05 %	0,17 %	0,23 %	0,45 %
	Terciptanya UMKM percontohan							
	Terciptanya UMKM percontohan	-	-	-	0,006 %	0,017 %	0,013 %	0,036 %

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian tahun ke ...					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Terciptanya daya saing UMKM								
	Terciptanya daya saing UMKM	-	-	-	0,88 %	0,99 %	1,05 %	2,92 %
Tersedianya akses teknologi tepat guna bagi UMKM								
	Tersedianya akses teknologi tepat guna bagi UMKM	-	-	-	25 %	35 %	40 %	100 %
Terbangunnya galeri UMKM								
38.	Terbangunnya galeri UMKM	-	-	-	50 %	25 %	25 %	100 %
Terwujudnya promosi, pameran, pemasaran dan pengembangan jaringan UMKM								
40.	Terwujudnya promosi, pameran, pemasaran dan pengembangan jaringan UMKM	-	3 Kali	16 %	20 %	28 %	15 %	79 %
Tercapainya pendidikan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja								
41.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja		16 AK 44.874. 000	20 AK 60.000. 000	20 AK 60.000. 000	20 AK 60.000. 000	20 AK 60.000. 000	20 AK 60.000.000
Tersedianya pelayanan ketenagakerjaan melalui bursa kerja online								
44.	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja			100% 25.000. 000	100% 25.000. 000	100% 35.000. 000	100% 35.000. 000	100% 35.000.000
	Penyusunan data base Tenaga kerja Daerah			11 Kec. 150.000. .000	11 Kec. 10.000. 000	11 Kec. 10.000. 000	11 Kec. 10.000. 000	11 Kec. 10.000.000
Terciptanya tenagakerja yg terampil dan siap kerja/wirausaha								
45.	Kerjasama pendidikan dan pelatihan		135 AK 214.448 .000	150 AK 292.500 .000	175 AK 341.250 .000	200 AK 390.000 .000	200 AK 390.000 .000	200 AK 390.000.000
Tercapainya perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan								
51.	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan			20 Perusa haan 20.000. 000	20 Perusa haan 25.000. 000	50 Perusa haan 50.000. 000	50 Perusa haan 50.000. 000	50 Perusahaan 50.000.000
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan			40 Perusa haan 30.000. 000	40 Perusa haan 35.000. 000	50 Perusa haan 50.000. 000	50 Perusa haan 50.000. 000	50 Perusahaan 50.000.000
	Peningkatan Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja		40 Perusa haan 15.506. 000	40 Perusa haan 20.000. 000	40 Perusa haan 25.000. 000	50 Perusa haan 40.000. 000	50 Perusa haan 40.000. 000	50 Perusahaan 40.000.000

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian tahun ke ...					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Terciptanya pengembangan wilayah transmigrasi								
52.	Pelatihan Transmigrasi Lokal		100% 84.063.000	100% 150.000.000	100% 150.000.000	100% 200.000.000	100% 200.000.000	100% 200.000.000
53.	Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM			100% 200.000.000	100% 500.000.000	100% 200.000.000	100% 200.000.000	100% 200.000.000
Tersedianya sarana prasarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi								
57.	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	-	100% 65.718.000	100% 250.000.000	100% 250.000.000	100% 250.000.000	100% 250.000.000	100% 250.000.000

BAB VII

P E N U T U P

Sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam pasal 89 ayat (1) dan (2) mengharuskan setiap SKPD membuat, menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2014-2018, dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2014, maka Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dokumen pendukung dan pelengkap dalam pelaksanaan tugas secara efisien, efektif guna menjamin eksistensi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di masa mendatang. Arah, Sasaran dan Program yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2014-2018 merupakan bahan muatan inti untuk penguatan Visi dan Misi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2014-2018. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
2. Penjabaran dari dokumen resmi Rencana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang seperti RPJPD 2005-2025, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014 – 2018 dan RKPD Tahun 2014
3. Seluruh stakeholders dan para pihak yang berkepentingan
4. Serta Isu strategis dan prioritas yang harus ditangani.

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 ini akan menjadi pedoman dan melandasi untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikianlah Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai Institusi Perencanaan Pembangunan di Daerah sebagai penjabaran Dokumen Perencanaan Makro Strategis yang telah ditetapkan untuk mengakselerasikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2018.

Pangkajene Sidenreng, 5 Januari 2017

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang

Drs. H.A. BAHARUDDIN S.

NIP. 19570814 198003 1 016

